



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada tanggal 26 Oktober 2020 telah disepakati rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180/1638/I.1/HUK, tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Pengajuan Propemperda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tim Propemperda Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 26 Oktober 2020;
3. Hasil Konsultasi Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sub Direktorat Wilayah III, Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, tanggal 12 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam penjadwalan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah prioritas Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA,**



**WIYATNO**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TANGGAL 27 NOVEMBER 2020**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2021**

No.	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
			Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah	Ruang lingkup rancangan peraturan daerah ini mencakup: a. keberadaan, kedudukan dan wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak; b. proses dan mekanisme pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak; c. hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak; d. kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak; e. lembaga adat; f. desa adat; g. peran serta dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak; h. tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan i. pendanaan.	✓		Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 UU No.5 Tahun 1960 Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 UU No.41 Tahun 1999 UU No.32 Th 2009 UU No.5 Th 2017 PMDN No.52 Th 2014 Permen ATR/ BPN No.10 Th 2016 Permen LHK No.P.17/ MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2020	✓		Dinas LH Dinas Kehutanan Disbudpar Dinas PM & Desa Biro Adm. Kesra. BPN/ATR	Masa Sidang I Tahun 2021 (lanjutan)	Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan	Ruang lingkup rancangan peraturan daerah ini mencakup: a. asas, maksud dan tujuan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; b. pelaksana dan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan; c. penyelesaian konflik pertanahan; d. pemberitahuan hasil penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; e. sistem informasi; f. peran serta masyarakat; dan g. pendanaan.	✓		UU No.7 Tahun 2012 UU No.23 Tahun 2014 Perpres No. 88 Tahun 2017 PermenNeg. Agraria/ Kepala BPN No.5 Tahun 1999	✓		Biro Pemerintahan Dinas Perkimtan BPN / ATR	Masa Sidang II Tahun 2021 (lanjutan)	Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ruang lingkup rancangan peraturan daerah ini mencakup: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; d. pemanfaatan; e. kerjasama; f. pemberdayaan petani; g. peran serta masyarakat; h. insentif dan disinsentif; i. pembinaan dan pengawasan; dan peran masyarakat.	✓		UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 41 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2012 UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 22 Tahun 2019 UU No. 11 Tahun 2020 PP No.1 Tahun 2011 PP No. 12 Tahun 2012 PP No. 25 Tahun 2012 PP No. 30 Tahun 2012	✓		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan  Dinas Ketahanan Pangan  Dinas PUPR  Dinas Perkebunan  Dinas Kehutanan	Masa Sidang II Tahun 2021	Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan	Ruang lingkup rancangan peraturan daerah ini mencakup: a. perencanaan; b. perlindungan petani dan nelayan; c. pemberdayaan petani dan nelayan; d. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan; e. pendanaan; f. pengawasan; dan g. peran serta masyarakat.	✓		UU No. 41 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2012 UU No. 19 Tahun 2013 UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 7 Tahun 2016 UU No.11 Tahun 2020	✓		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan  Dinas Ketahanan Pangan  Dinas Kelautan dan Perikanan	Masa Sidang II Tahun 2021	Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Perlindungan dan pengakuan atas status hukum penduduk; b. Langkah dan tindakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan c. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.	✓		UU No. 23 Tahun 2006 diubah dengan UU No.24 Tahun 2013	✓		Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Masa Sidang I Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: -Kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan Daerah Aliran Sungai; -Peranserta para pihak pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.	✓		UU No. 41 Tahun 1999 UU No. 23 Tahun 2014	✓		Dinas Kehutanan Dinas PUPR	Masa Sidang I Tahun 2021 (lanjutan)	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Ruang Lingkup perubahan Perda meliputi: - Tuntutan Perbendaharaan; - Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.		✓	PP No.38 Tahun 2016 PMDN No.133 Tahun 2018		✓	Inspektorat BKAD	Masa Sidang I Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
8.	Cagar Budaya	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Kriteria Cagar Budaya; b. Pemilikan dan Penguasaan; c. Cagar Budaya Khas Daerah; d. Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya; dan e. Pembinaan dan Pengawasan.	✓		UU No. 10 Tahun 2009 UU No. 11 Tahun 2010 UU No. 23 Tahun 2014 Perda No. 2 Tahun 2013	✓		Disbudpar Dinas Pendidikan	Masa Sidang I Tahun 2021 (lanjutan)	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
9.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi Regulasi dan Kebijakan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.	✓		UU No.23 Tahun 2014 PP No.12 Tahun 2019 PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP		✓	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Masa Sidang II Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: - Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; - Kebijakan dan strategi pembangunan daerah	✓		UU No. 25 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014 PMDN No. 86 Tahun 2017	✓		Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Masa Sidang III Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Perpustakaan	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	✓		UU No. 43 Tahun 2007. UU No. 23 Tahun 2014	✓		Dinas Perpustakaan dan Arsip	Masa Sidang III Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
12.	Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalimantan Tengah	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: - Arah Kebijakan - Pembinaan dan Pengawasan - Peran serta masyarakat	✓		PP No.57 Tahun 2014 Perpres No.63 Tahun 2019	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan	Masa Sidang III Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2021

No.	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
			Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, dan Ikhtisar Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.	✓		UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 12 Tahun 2019 PMDN No. 33 Tahun 2019		✓	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Masa Sidang II Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.	✓		UU No. 23 Tahun 2014 PP No.12 Tahun 2019 PMDN No. 64 Tahun 2020		✓	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Masa Sidang II Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
15.	APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022	Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.	✓		UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 12 Tahun 2019		✓	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Masa Sidang III Tahun 2021	Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KETUA,**

  
**WIYATNO**